

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

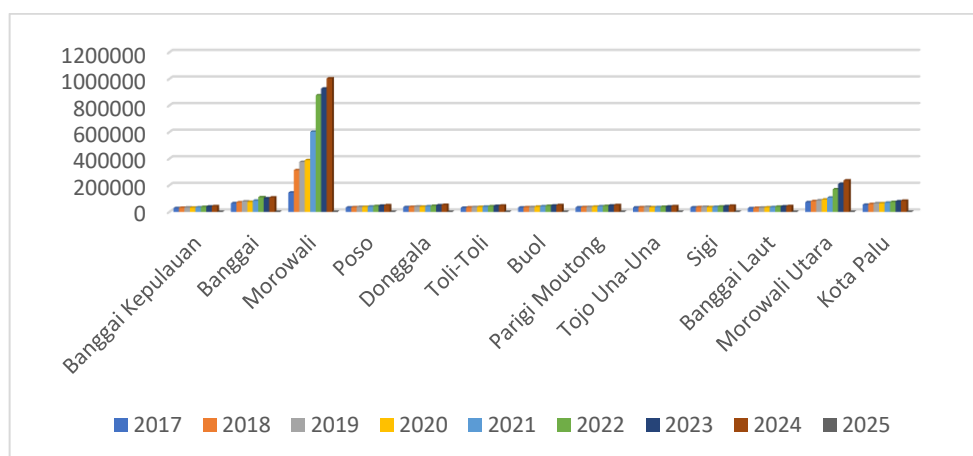
Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata antarwilayah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan guna meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta memperkecil kesenjangan regional (Widodo et al., 2024). Instrumen utama kebijakan ini adalah transfer fiskal yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH), yang dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan kemampuan pendapatan asli daerah yang terbatas. Selain transfer fiskal, penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi (Pongge et al., 2025).

Implementasi desentralisasi fiskal selama lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2025, meskipun perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,11%, angka Gini Ratio masih berada pada level 0,363, yang menegaskan adanya kesenjangan capaian pembangunan antarwilayah secara nasional maupun regional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata secara spasial dan masih sangat bergantung

pada penerapan instrumen fiskal yang lebih efektif (Sentari et al., 2025). Di sisi lain, distribusi PMA yang cenderung terkonsentrasi pada daerah tertentu juga berpotensi memperbesar kesenjangan antarwilayah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan investasi yang inklusif (Maichal et al., 2024).

Kondisi tersebut tercermin di Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah (2025) yang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,47 persen pada tahun 2025 dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Sekaligus Indeks Williamson Sulawesi Tengah menunjukkan nilai yang relatif tinggi dan cenderung berfluktuasi selama periode 2017-2025, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor pertambangan dan investasi asing belum sepenuhnya terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah (Maichal et al., 2024). Untuk memahami sejauh mana ketimpangan tersebut terjadi, diperlukan analisis terhadap perkembangan PDRB per kapita antarkabupaten/kota sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Gambar 1.1 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2017-2025 (Miliar Rupiah)

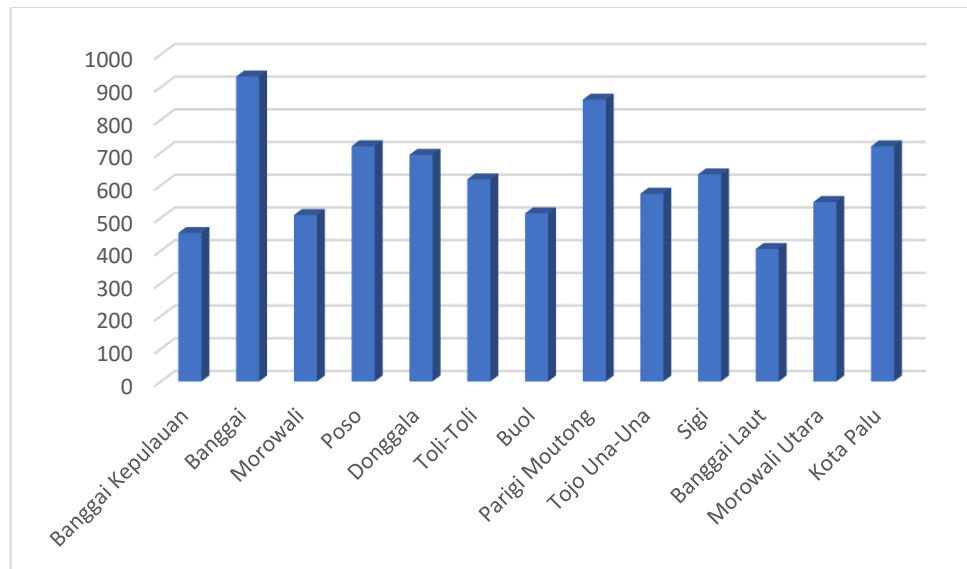


Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Berdasarkan gambar 1.1, data PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2017-2025 memperlihatkan pola pertumbuhan yang tidak merata antarwilayah. Pada tahun 2025 Kabupaten Morowali mencatat PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp1.072,574 miliar, diikuti Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp292,019 miliar, keduanya didorong oleh intensifikasi hilirisasi industri nikel sehingga selisih absolut dengan kabupaten lain semakin melebar dari tahun ke tahun. Sebaliknya, Kabupaten Tojo Una-Una mencatat nilai terendah sebesar Rp46,555 miliar, diikuti Banggai Kepulauan sebesar Rp46,829 miliar dan Banggai Laut sebesar Rp47.112 miliar, karena struktur ekonominya masih didominasi sektor primer dengan nilai tambah terbatas (Cokro et al., 2025). Kondisi ini menciptakan fenomena *dualistic economy*, di mana sektor ekstraktif tumbuh pesat sementara sektor tradisional lainnya tertinggal, yang memperkuat indikasi adanya ketimpangan spasial yang bersifat struktural apabila tidak diimbangi kebijakan pemerataan investasi dan penguatan konektivitas antarwilayah (Fatma et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan Indeks Williamson sebagai proksi ketimpangan pembangunan antarwilayah karena kemampuannya menangkap disparitas PDRB per kapita secara tertimbang berdasarkan proporsi penduduk, sehingga memberikan gambaran yang lebih representatif dibandingkan pengukuran ketimpangan sederhana. Salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap ketimpangan tersebut adalah mekanisme transfer fiskal yang diterima masing-masing kabupaten/kota. Untuk memperoleh gambaran awal mengenai distribusi transfer fiskal antardaerah, berikut disajikan data realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai komponen transfer fiskal dengan porsi terbesar dan fungsi pemerataan paling dominan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 (Miliar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2026)

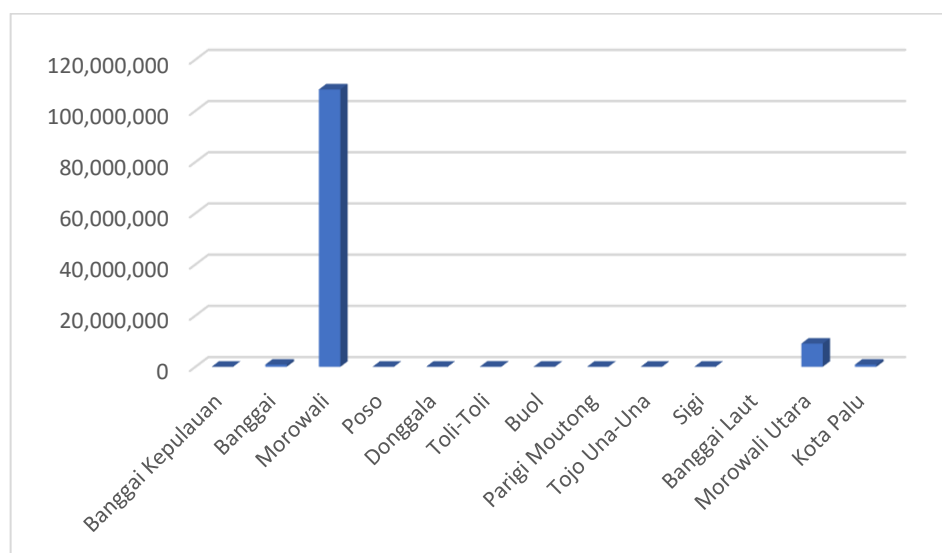
Berdasarkan gambar 1.2, realisasi DAU di kabupaten/kota Sulawesi Tengah periode 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat secara nominal, meskipun distribusinya tetap bervariasi antardaerah. Kabupaten Banggai menerima DAU tertinggi sebesar Rp932,190 miliar, diikuti Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp861,640 miliar, dan Kabupaten Poso sebesar Rp719,380 miliar, mencerminkan besarnya kebutuhan fiskal dari aspek jumlah penduduk dan kondisi geografis (Santi & Iskandar, 2021). Sebaliknya, Kabupaten Banggai Laut menerima DAU terendah sebesar Rp405,100 miliar, yang mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal dan jumlah penduduk yang signifikan antardaerah. Meskipun demikian, tingginya alokasi DAU tidak serta-merta menjamin penurunan ketimpangan pembangunan apabila tidak diikuti dengan pengelolaan belanja yang efektif dan produktif, mengingat sebagian besar alokasi seringkali terserap untuk belanja pegawai yang kurang produktif (Arrosyid & Bawono, 2025).

Pembahasan sebelumnya difokuskan pada DAU sebagai komponen transfer fiskal yang memiliki porsi terbesar dan fungsi pemerataan paling dominan, penelitian ini secara keseluruhan tetap menganalisis seluruh komponen dana perimbangan yang meliputi DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama sebagai variabel independen. DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga kabupaten dengan kebutuhan infrastruktur besar cenderung mendapatkan alokasi yang lebih tinggi. Sementara itu, DBH yang bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam dinikmati secara tidak merata, di mana kabupaten kaya sumber daya alam seperti Morowali dan Morowali Utara memperoleh DBH jauh lebih besar dibandingkan kabupaten lain, yang justru berpotensi memperlebar ketimpangan fiskal antardaerah apabila tidak diimbangi redistribusi yang memadai melalui DAU dan DAK (Ridho & Wijayanti, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transfer fiskal yang meliputi DAU, DAK, dan DBH terus mengalami peningkatan secara nominal setiap tahunnya, ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran dana transfer yang diterima belum sepenuhnya mampu menutupi kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah, terutama karena variasi penerimaan DBH yang justru semakin memperkuat dominasi fiskal daerah yang sudah kaya sumber daya alam (Arrosyid & Bawono, 2025). Selain transfer fiskal, diperlukan instrumen lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu instrumen strategis yang diharapkan mampu mengisi kesenjangan tersebut melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan

lapangan kerja, dan transfer teknologi ke berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.3 Realisasi Investasi PMA per Kabupaten/Kota Tahun 2025 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2026)

Berdasarkan Gambar 1.3, realisasi PMA di Sulawesi Tengah tahun 2025 menunjukkan konsentrasi investasi yang sangat kuat di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, didorong oleh dominasi sektor hilirisasi industri nikel. Kabupaten Morowali mencatat realisasi PMA tertinggi sebesar Rp108.322,26 miliar, diikuti Morowali Utara sebesar Rp9.036,35 miliar. Secara bersama-sama, kedua kabupaten tersebut menyerap 98,5% dari total PMA provinsi sebesar Rp119.188,04 miliar, sementara 11 kabupaten/kota lainnya hanya menerima sisanya sebesar 1,5%. Kabupaten lain menerima aliran PMA dalam skala yang jauh lebih kecil sehingga tidak memperoleh dorongan pertumbuhan ekonomi yang setara. Kondisi ini memperkuat pola aglomerasi ekonomi dan menciptakan fenomena enclave economy, di mana pertumbuhan terpusat secara spasial

sementara daerah non-tambang tertinggal akibat keterbatasan keterkaitan antarsektor (Abduh, 2025).

Keterkaitan antara tingginya realisasi PMA dan peningkatan PDRB per kapita terlihat cukup jelas berdasarkan gambar 1.1, khususnya di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Hal ini menunjukkan bahwa investasi asing menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Pongge et al., 2025). Namun karena distribusinya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, PMA justru berpotensi meningkatkan kesenjangan antarwilayah apabila manfaatnya tidak menyebar melalui efek *spillover* ke daerah sekitarnya. Perbedaan ini memperkuat indikasi adanya ketimpangan spasial yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi berpotensi bersifat struktural apabila tidak diimbangi kebijakan pemerataan investasi yang lebih inklusif (Yulikasari & Samsuddin, 2025).

Pola ketimpangan pembangunan akibat konsentrasi investasi turut ditemukan pada kajian ketimpangan wilayah di provinsi lain di Indonesia. Septiani & Endang (2022) yang mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur melalui Indeks Williamson menemukan bahwa ketimpangan wilayah tergolong tinggi dan cenderung meningkat, yaitu dari 0,93 pada tahun 2016 menjadi 0,97 pada tahun 2020, seiring terkonsentrasinya PDRB pada wilayah-wilayah maju seperti Kota Surabaya dan sekitarnya. Sebaliknya, penelitian Taufiqurrachman & Hariani (2024) di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson justru dapat diturunkan dari 0,045 menjadi 0,035 dalam periode 2015-2022, seiring keberhasilan kebijakan pemulihan pembangunan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19. Perbandingan kedua kasus tersebut mengindikasikan bahwa arah dan besaran ketimpangan pembangunan

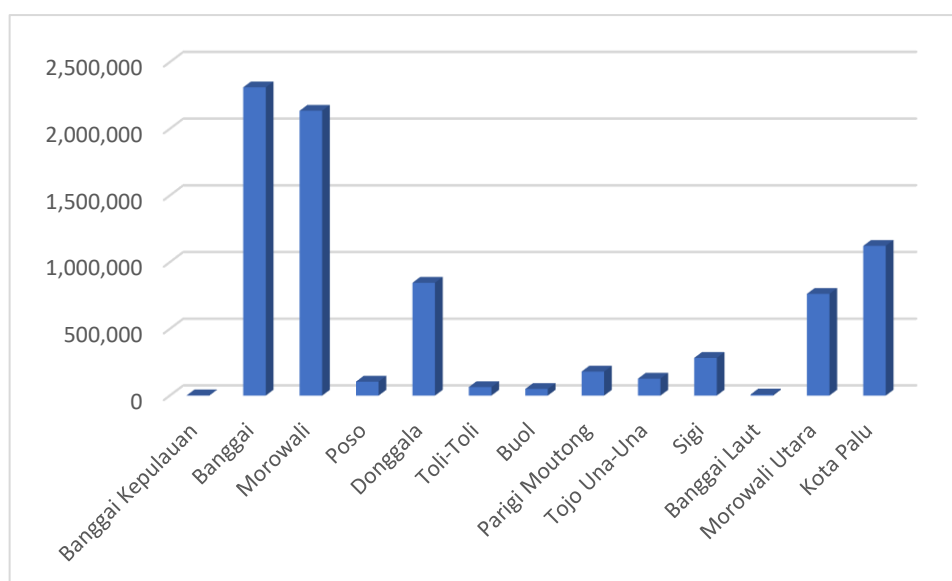
antarwilayah sangat bergantung pada karakteristik struktur ekonomi serta efektivitas kebijakan pemerataan investasi dan fiskal pada masing-masing daerah, sehingga fenomena ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah relevan untuk dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan karakteristik investasi PMA dan PMDN yang masih terkonsentrasi pada sektor hilirisasi nikel.

Provinsi Sulawesi Tengah menerima PMA dan transfer fiskal yang terus meningkat setiap tahun, namun ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota masih terjadi. Di satu sisi, dominasi investasi pada sektor hilirisasi nikel menciptakan pertumbuhan yang terpusat secara spasial, sementara di sisi lain variasi penerimaan dana transfer belum sepenuhnya mampu menutupi kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah (Lahadalia et al., 2024). Selain PMA, penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga menjadi variabel penting yang perlu dikaji pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan, mengingat distribusi investasi domestik antarkabupaten/kota juga menunjukkan pola yang tidak merata. Untuk memperoleh gambaran mengenai distribusi PMDN antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, berikut disajikan data realisasi investasi PMDN pada gambar berikut.

Apabila dikaitkan dengan data PDRB per kapita pada gambar 1.1, pola konsentrasi investasi yang tampak pada PMA turut memunculkan pertanyaan apakah kecenderungan serupa juga terjadi pada penanaman modal dalam negeri. Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang tercatat memiliki PDRB per kapita tertinggi sekaligus menjadi tujuan utama PMA, sehingga menarik untuk dicermati apakah kedua daerah tersebut juga mendominasi penyerapan PMDN, ataukah justru PMDN memiliki pola sebaran yang berbeda dan lebih menjangkau kabupaten/kota lain di luar kawasan hilirisasi nikel. Perbandingan pola sebaran

PMA dan PMDN ini penting untuk memahami secara utuh sumber ketimpangan investasi antarwilayah, mengingat investasi yang terkonsentrasi pada satu wilayah dapat menghasilkan efek sebaran (*spread effect*) berupa keterkaitan ekonomi ke daerah sekitarnya, atau sebaliknya menimbulkan efek backwash yang justru memperlebar kesenjangan antarwilayah (Sjafrizal, 2018). Kedua variabel tersebut selanjutnya dianalisis lebih lanjut pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan yang diukur menggunakan Indeks Williamson. Untuk memperoleh gambaran mengenai distribusi PMDN antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, berikut disajikan data realisasi investasi PMDN pada gambar berikut.

Gambar 1.4 Realisasi Investasi PMDN per Kabupaten/Kota Tahun 2025 (Miliar Rupiah)



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2026)

Berdasarkan Gambar 1.4, realisasi investasi PMDN di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 menunjukkan pola distribusi yang lebih merata dibandingkan PMA, meskipun masih terdapat perbedaan yang signifikan antarkabupaten/kota. Total PMDN provinsi mencapai Rp7.992,55 miliar, dengan Kabupaten Morowali sebagai penerima terbesar sebesar Rp2.135,01 miliar, diikuti Kabupaten Banggai

sebesar Rp2.310,34 miliar dan Kota Palu sebesar Rp1.122,35 miliar. Sementara itu, sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Tengah hanya menerima aliran PMDN dalam jumlah yang sangat terbatas, bahkan Banggai Kepulauan dan Banggai Laut hampir tidak mendapatkan investasi dalam negeri sama sekali dengan masing-masing hanya Rp2,34 miliar dan Rp8,21 miliar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PMDN, seperti halnya PMA, cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya alam dan infrastruktur pendukung industri, sehingga manfaat ekonominya belum merata ke seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transfer fiskal memiliki hubungan langsung dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah, namun hasilnya belum sepenuhnya konsisten. Penelitian Triyono *et al.* (2021) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, namun efeknya berbeda antar daerah karena variasi kapasitas fiskal dan struktur ekonomi, menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana dari pemerintah pusat belum otomatis memperkecil disparitas tanpa peningkatan kualitas pengelolaan fiskal daerah. Penelitian Ridho & Wijayanti (2022) menambahkan bahwa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antardaerah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komposisi dana, kualitas belanja publik, dan karakteristik struktural masing-masing daerah. Temuan ini mempertegas bahwa tidak semua komponen transfer fiskal memberikan dampak yang seragam dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.

Penelitian lain menegaskan bahwa transfer fiskal tanpa penguatan kapasitas fiskal riil daerah dapat gagal mengurangi disparitas pembangunan. Penelitian Aprilina (2021) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan antar kabupaten/kota, yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dana belum sepenuhnya efektif dalam mempersempit kesenjangan wilayah. Penelitian Arrosyid & Bawono, (2025) juga menyimpulkan bahwa ketergantungan pada transfer pusat tanpa tata kelola belanja yang produktif justru dapat memperlebar jarak pembangunan antar wilayah, yang menegaskan bahwa pengelolaan fiskal daerah menjadi faktor kunci dalam menurunkan ketimpangan pembangunan.

Penelitian mengenai penanaman modal asing (FDI) memperlihatkan temuan yang beragam terhadap ketimpangan regional. Menurut Maichal *et al.* (2024) menemukan bahwa FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar provinsi karena investasi cenderung terkonsentrasi di daerah dengan basis ekonomi dan infrastruktur lebih baik, sehingga daerah tertinggal kurang mendapatkan manfaat langsung. Sementara itu, Triyono *et al.* (2021) menunjukkan bahwa FDI tidak berpengaruh langsung signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, tetapi melalui pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi disparitas antar wilayah, menegaskan bahwa efek FDI terhadap ketimpangan sangat bergantung pada kebijakan redistribusi dan kondisi ekonomi lokal.

Upaya mengatasi kondisi tersebut, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas tiga instrumen utama pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Dari sisi transfer fiskal, diperlukan reformulasi kebijakan alokasi yang lebih berkeadilan dan proporsional sesuai kebutuhan riil antardaerah, sehingga

kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah memperoleh dukungan yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Ridho & Wijayanti, 2022). Dari sisi PMA, diperlukan kebijakan yang mendorong penyebaran distribusi investasi asing secara lebih merata ke kabupaten-kabupaten yang selama ini tertinggal, agar manfaat ekonomi dari investasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu namun dapat menyebar ke seluruh wilayah Sulawesi Tengah (Maichal et al., 2024). Sedangkan dari sisi PMDN, diperlukan kebijakan yang mendorong pemerataan distribusi investasi domestik ke kabupaten-kabupaten yang selama ini kurang terlayani agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih merata (Nadzir & Kenda, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh transfer fiskal dan PMA terhadap ketimpangan pembangunan, namun dengan cakupan wilayah dan proksi yang berbeda. Penelitian Nurcahyo *et al.* (2020) mengkaji ketimpangan di Kalimantan Timur, Ridho & Wijayanti (2022) menggunakan data 34 provinsi di Indonesia, serta Maichal *et al.* (2024) dan Triyono *et al.* (2021) juga menggunakan unit analisis level provinsi dengan proksi Indeks Gini sebagai pengukur ketimpangan. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas transfer fiskal, PMA dan PMDN terhadap ketimpangan pembangunan pada level kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Indeks Williamson sebagai proksi ketimpangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan unit analisis level kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan Indeks Williamson sebagai proksi ketimpangan pembangunan, serta menganalisis secara bersamaan pengaruh transfer fiskal yang diproksikan melalui DAU, DAK, dan DBH bersama PMA dan PMDN pada periode 2017-2025, dengan menerapkan pendekatan

Generalized Method of Moments (GMM) melalui estimasi data panel dinamis yang belum pernah dilakukan pada wilayah yang sama sebelumnya. Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif dalam upaya memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, khususnya mekanisme transfer fiskal yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH), serta distribusi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan transfer fiskal terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2025?
2. Bagaimana hubungan penanaman modal asing (PMA) terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2025?
3. Bagaimana hubungan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan transfer fiskal terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2025
2. Untuk menganalisis hubungan penanaman modal asing (PMA) terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2025
3. Untuk menganalisis hubungan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2025

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Memperkaya literatur ilmiah tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, melalui penerapan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM) sehingga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonometrika dan ekonomi pembangunan.
 - 2) Menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai penerapan metode GMM dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah secara lebih akurat dan efisien.
 - 3) Dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang, khususnya dalam kajian ketimpangan

pembangunan regional dan pengembangan pendidikan di Universitas Bojonegoro.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengenai faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti membatasi ruang lingkupnya sebagai berikut:

1. Variabel transfer fiskal dalam penelitian ini mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) yang diterima masing-masing kabupaten/kota
2. Variabel penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dibatasi pada realisasi investasi asing per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode penelitian
3. Periode waktu yang digunakan pada penelitian ini Adalah tahun 2017-2025
4. Ketimpangan pembangunan diukur menggunakan Indeks Williamson yang dihitung berdasarkan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk per kabupaten/kota
5. Menggunakan estimasi data panel dinamis dengan dua model *Generalized Method of Moment* yaitu: *First Difference GMM* dan *System GMM* yang dikembangkan oleh Arellano-Bond, untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang